

Dana Hibah Tunjang Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan



Sumber gambar:

https://img.antaraneews.com/cache/730x487/2022/08/05/297294686_1174316699783780_6428697644622325731_n.jpg.webp

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) menyerahkan bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, baik untuk lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama (Kemenag) maupun Dinas Pendidikan (Disdik) HSS,

Dana hibah ini untuk pengelolaan pendidikan swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkup Kemenag, dan hibah barang TIK untuk jenjang sekolah dasar(SD) dan sekolah menengah pertama(SMP), serta Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) jenjang TK. “Kami meminta penerima dana hibah pendidikan benar-benar memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan alat yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola dengan baik,” kata Bupati HSS H Achmad Fikry di SD Alam Muhammadiyah, Kamis (4/8) kemarin.

Dijelaskan dia, bantuan ini agar bisa meringankan biaya operasional, dan posisi pemerintah daerah akan terus mengawal kemajuan pendidikan di Kabupaten HSS. Dengan melihat SD Alam Muhammadiyah menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak harus dibatasi ruang, pendidikan tidak harus di dalam ruangan, tapi belajar bisa di mana saja. Di kesempatan ini, ia mengatakan akan menyasar vaksinasi lagi, karena COVID-19 mulai muncul kembali. Di sekolah protokol kesehatan harus tetap jalan, dan yang belum vaksinasi harus ikut vaksinasi, Karena ini ikhtiar untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Adapun bantuan yang diserahkan terdiri atas dana hibah pengelolaan pendidikan swasta tahun anggaran(TA) 2022, yaitu SD Alam Muhammadiyah Rp100 juta. Dana hibah BOS lingkup Kemenag TA 2022 yang diwakilkan MI Al Injaz, Kecamatan Kandangan, MI Tambak, Kecamatan Padang Batung dan MTS Izharussalam, Kecamatan Daha Selatan masing Rp15 juta.

Penyerahan APE kepada TK Negeri Pembina Telaga Langsung berupa APE dalam dan kepada TK Batu Bini berupa APE dalam dan APE luar. Kemudian, bantuan TIK berupa kabel HDMI, proyektor, wireless, laptop atau chromebook kepada SDN Kandangan Utara 2, SDN Kandangan Barat 2, SDN Tambangan 4, dan SDN Pihanin 2. Terakhir, bantuan TIK berupa HDMI, proyektor, wireless, laptop atau chromebook untuk SMP Islam Terpadu (SMPIT) Tarbiyatul Furqon, Kandangan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyerahkan bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022. Bantuan ini diserahkan untuk kegiatan Pengelolaan Pendidikan Swasta, Bantuan Operasional Sekolah Lingkup Kementerian Agama dan Hibah Barang Teknologi dan Komunikasi (TIK) untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) jenjang TK.

Penyerahan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati HSS H Achmad Fikry yang digelar di SD Alam Muhammadiyah, Kota Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (4/8/2022). Adapun bantuan yang diserahkan terdiri dari Dana Hibah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Swasta Tahun Anggaran 2022 yaitu SD Alam Muhammadiyah Rp 100 juta.

Kemudian, Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah Lingkup Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 yang diwakilkan oleh MI Al Injaz Kecamatan Kandangan Rp 15 juta. Bupati H Achmad Fikry saat menyerahkan Dana Hibah untuk sekolah-sekolah yang digelar di SD Alam Muhammadiyah, Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (4/8/2022). Serta, Madrasah Ibtidaiyah Tambak Kecamatan Padang Batung Rp 15 juta serta MTS Izharussalam Kecamatan Daha Selatan Rp 15 juta.

Selanjutnya, Alat Permainan Edukatif (APE) pada TK Negeri Pembina Telaga Langsung berupa APE Dalam dan kepada TK Batu Bini berupa APE Dalam dan APE Luar. Juga ada, Bantuan TIK berupa kabel HDMI, proyektor, wireless, laptop maupun chromebook kepada SDN Kandangan Utara 2, SDN Kandangan Barat 2, SDN Tambangan 4, dan SDN Pihanin 2.

Berikturnya, bantuan TIK berupa HDMI, proyektor, wireless, laptop maupun chromebook untuk Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Tarbiyatul Furqon. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan HSS, Siti Erma, mengatakan, dana bantuan ini merupakan Dana Hibah, BOSDA lingkup Kemenag, TIK Bidang sekolah dasar dan Alat bermain Edukatif dari DAK yang mana semua merupakan tahun anggaran 2022.

Bupati H Achmad Fikry tanam pohon dalam rangkaian acara penyerahan Dana Hibah untuk sekolah-sekolah yang digelar di SD Alam Muhammadiyah, Kota

Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) , Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (4/8/2022).

“Dana bantuan bosda dari Kementerian Agama tahun anggaran 2022 dengan total dana sebesar Rp 525 juta untuk 35 sekolah yang mana masing-masing mendapatkan 15 juta. Selain itu juga Bantuan tingkat SD tahun 2022 dengan total bantuan Rp 463 juta untuk empat sekolah,” katanya.

Selain itu, bantuan permainan edukatif luar dan dalam sebesar Rp 99 juta untuk tiga sekolah. Penerima bantuan alat bermain dalam edukatif dari dana DAK dengan total biaya sebesar Rp 74.664. 000 diberikan kepada lima sekolah. Serta, bantuan untuk tingkat SMP Rp 115.120.500 untuk satu sekolah.

Bupati HSS H Achmad Fikry meminta kepada penerima dana hibah pendidikan agar benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan, alat yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola dengan baik.

Bupati H Achmad Fikry melihat lingkungan SD Alam Muhammadiyah, dalam rangkaian acara penyerahan Dana Hibah untuk sekolah-sekolah, di Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (4/8/2022). “Saya berharap bantuan ini bisa meringankan biaya operasional. Pemerintah Daerah akan terus mengawal kemajuan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” katanya.

Selain itu, Ia mengatakan, melihat SD Alam Muhammadiyah menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak harus dibatasi ruang, pendidikan tidak harus di dalam ruangan, tapi belajar bisa dimana saja. Di kesempatan ini, Bupati mengatakan, akan menyasar vaksinasi lagi karena Covid-19 mulai muncul kembali.

Di sekolah, protokol kesehatan harus tetap jalan. Bagi yang belum vaksinasi, harus ikut vaksinasi. Karena, ini adalah ikhtiar untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/338041/dana-hibah-tunjang-pendidikan-lingkup-disdik-dan-kemenag-hss>, (05/08/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/04/bupati-hulu-sungai-selatan-h-achmad-fikry-serahkan-dana-hibah-untuk-sekolah?page=all>.

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
- 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.